

Peran Liga Arab Memperjuangkan Hak-hak Narapidana Palestina di Israel 2014-2017

Rafika Widyasmara

rafikawdyasmara@gmail.com

Pembimbing : Dr. Sidik Jatmika, M.Si.

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55183

Telp : (0274) 387656

Abstract

This research discusses about the roles and efforts of Arab League in the struggle for the rights of Palestinian prisoners in Israel that violated by the prison authorities from 2014 until 2017. The purpose of this research is to analyze about those roles and efforts of Arab League in helping Palestinian prisoners. Based on the research that has been done, researcher found that Arab League as an international organization has two functions which are function of articulation and aggregation and function of information. Those two functions explain the roles in helping Palestinian that convicted to get their rights.

Keywords: Arab league, Israel, Palestinian Prisoners' rights

Pendahuluan

Pada bulan Maret tahun 1945 dibentuklah sebuah organisasi regional bernama Liga Arab yang beranggotakan 22 negara Arab. Dari keseluruhan anggota tadi, termasuklah di dalamnya Palestina yang mana organisasi ini sendiri memiliki misi untuk menjalin koordinasi antar negara anggotanya. Berdasarkan Piagam Liga Arab, para negara yang menginisiasi berdirinya Liga Arab yaitu Suriah, Mesir, Lebanon, Irak, Yordania, Yaman dan Arab Saudi telah sepakat untuk melakukan kerjasama yang saling mendukung di bidang ekonomi, budaya, komunikasi, kesehatan, dan lain-lain (League).

Lima tahun setelah dibentuknya Liga Arab yakni pada 1950, organisasi ini menyepakati sebuah perjanjian militer, yang mana agresi terhadap satu negara Arab berarti juga agresi bagi seluruh anggota dan akan dihadapi dan diselesaikan secara

bersama pula. Liga Arab sebagai organisasi internasional tentu memiliki fungsi serta tujuan. Dikarenakan gagasan utama dari pembentukan Liga Arab sendiri ialah sebagai ranah untuk saling membantu dalam memecahkan masalah masyarakat Arab.

Dalam beberapa poin visi Liga Arab yang terbilang cukup luas, terdapat agenda-agenda ambisius yang ditetapkan oleh Liga Arab bagi dirinya sendiri. Bahkan berdasarkan tugas-tugas yang telah ditetapkan tersebut, dapat dikatakan bahwa Liga Arab sangat mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel. Poin-poin tersebut seperti misalnya dengan jelas disebutkan untuk mendukung Palestina, dan membantu masyarakat Arab mendapatkan kemerdekaan mereka dari kolonialisme barat (Toffolo, *The Arab League (Global Organization)*, 2008, p. 4).

Sudah banyak sumber yang menyatakan bahwa para narapidana Palestina di Israel tidak mendapatkan hak-hak mereka sehingga mereka menuntut pemerintah Israel untuk segera memberikan haknya. Pada tanggal 12 Mei lalu, *Israel's Public Defender's Office* (PDO), melaporkan bagaimana perlakuan-perlakuan tidak manusiawi yang diterima oleh para tahanan di penjara Israel. Selain menerima perlakuan buruk, fasilitas dari penjara di Israel juga mereka nilai sangat tidak layak (Almas, 2019). Apabila dikaitkan dengan tujuan utama dibentuknya Liga Arab, seharusnya banyak campur tangan negara Arab yang terlihat mendukung Palestina. Namun pada kenyataannya negara anggota kerap kali terlibat kerjasama dengan negara barat yang mendukung Israel. Tentu keadaan ini dapat dikaitkan dengan pernyataan Mochtar Mas'ood dalam bukunya. Dimana ketika negara-negara Arab telah memiliki

kekuasaan, maka hal selanjutnya yang dikejar adalah kepentingan nasional. Sehingga kepentingan dalam suatu kelompok tentu tidak lagi menjadi prioritas.

Lalu

mengapa konflik Israel dan Palestina tampak tidak kunjung reda dikarenakan diplomasi Israel yang semakin lihai menyebabkan menyempitnya 'arena klaim diplomasi' dari Palestina sendiri. Seperti yang telah dijelaskan Sidik Jatmika dalam bukunya "*Hubungan Internasional di Kawasan Timur Tengah*" berikut adalah proses reduksi arena konflik Palestina versus Israel (Jatmika, 2016):

1. Sebelum perang yang terjadi pada tahun 1967, konflik Arab dan Israel merupakan isu antara Dunia Islam yang mana para pembela

- bangsa Palestina yang mayoritas beragama Islam melawan Israel.
2. Sesudah perang pada tahun 1967, retorika “Solidaritas Arab” menjadi hal yang umum dengar. Isu yang ada menjadi lebih sempit yakni “isu konflik Bangsa Arab versus Israel”.
 3. Setelah Perjanjian Camp David, maka isu semakin bergeser dimana Mesir mengakui kedaulatan Israel menjadi “Palestina versus Israel”.

Setelah perjanjian Oslo pada 1993 dimana *Palestine Liberation Organization* (PLO) telah

mengakui keberadaan dari Israel, sehingga isu kembali bergeser menjadi lebih sempit yaitu masalah antar sesama bangsa Palestina (PLO versus Hamas).

Kerangka Pemikiran

Organisasi internasional merupakan konsep yang sering ditemukan dalam studi hubungan internasional. Konsep organisasi internasional ini dapat didefinisikan sebagai suatu pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari pada struktur organisasi yang jelas, yang diharapkan dapat berfungsi secara berkesinambungan dan melembaga dalam usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperlukan serta yang disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda (Rudy, Administrasi dan Organisasi Internasional, 2009).

Secara umum telah dijelaskan oleh A. Lerroy Bennet (Bennet, 1979) mengenai beberapa ciri yang dimiliki oleh organisasi internasional ialah sebagai berikut:

- 1) Organisasi tetap untuk melaksanakan fungsi yang berkelanjutan.
- 2) Keanggotaan yang bersifat sukarela/tanpa paksaan dari peserta yang memenuhi syarat.
- 3) Instrumen dasar yang menyatakan tujuan, struktur dan metode operasional.
- 4) Badan pertemuan perwakilan konsultatif yang luas.
- 5) Sekretariat tetap untuk melanjutkan fungsi administrasi, penelitian dan informasi secara berkelanjutan.

Secara umum, ada delapan fungsi yang dimiliki organisasi internasional bagi para anggotanya. Menurut Bennet (1995) berikut ini adalah fungsi-fungsi tersebut:

- 1) Artikulasi dan Agregasi yakni *International Organization* yang berfungsi sebagai instrumen bagi suatu negara untuk proses artikulasi serta agregasi negaranya. Organisasi internasional menjadi suatu wadah forum diskusi serta negosiasi antar negara anggota dalam sistem internasional.
- 2) Norma yaitu *internatianal organization* merupakan aktor, forum, dan instrumen yang memiliki peran penting dalam kegiatan

- normatif dari sistem politik internasional. Misalnya, membuat dan menetapkan berbagai nilai dan prinsip non-diskriminasi.
- 3) Rekrutmen yakni *international organization* memiliki peran yang penting dalam merekrut partisipan dalam sistem politik internasional.
 - 4) Sosialisasi yakni sebuah upaya untuk mentransfer nilai-nilai kepada seluruh anggota sistem secara sistematis. Proses ini memberikan kontribusi terhadap penerimaan dan juga peningkatan nilai kerjasama antar negara.
 - 5) Pembuat peraturan yaitu sistem internasional tidak memiliki pemerintahan dunia. Sehingga dalam pembuatan keputusan internasional pada umumnya akan berdasarkan kepada tindakan masa lalu, perjanjian ad hoc, oleh organisasi internasional.
 - 6) Pengesahan peraturan yakni *international organization* memiliki tugas yang

penting dalam hal pengesahan berbagai aturan di dalam sistem internasional.

Dalam hal ini, lembaga kehakiman memiliki fungsi adjudikasi meskipun tidak dilengkapi dengan lembaga yang memadai.

7) Informasi yakni organisasi antar negara juga memiliki fungsi dan peranan dalam pencarian, pengumpulan, pengolahan dan penyebaran informasi.

8) Operasional yakni *international organization*

melaksanakan sejumlah fungsi operasional di berbagai bidang.

Sehingga

Liga Arab dalam pengoperasiannya selama ini, sesuai dengan dua poin fungsi menurut Bennet yaitu fungsi sebagai artikulasi dan agregasi serta fungsi sebagai informasi bagi negara anggotanya.

Kedua fungsi inilah yang akan berkaitan dengan upaya Liga Arab dalam usaha memperjuangkan hak-hak narapidana Palestina yang ditahan di Israel.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Organisasi Liga Arab

Dunia Ketika II Perang masih

berlangsung, terdapat keinginan yang muncul diantara negara-negara Arab di Timur Tengah untuk mendirikan sebuah organisasi. Organisasi tersebut diharapkan dapat memberikan wadah dalam berbagai aspek dan dapat menjadi penengah atau mediator ketika terjadi perselisihan di antara sesama negara Arab ataupun dengan negara non-Arab. Keinginan ini kemudian didukung oleh Inggris pada tahun 1942 dikarenakan Inggris memiliki motif untuk negara-negara Arab agar bergabung dengan pihak Sekutu. Namun pada saat itu negara-negara Arab tidak memiliki ketertarikan untuk bergabung (Firman, 2019).

Hingga akhirnya pada tahun 1945 dibentuklah organisasi regional yang bernama Liga Arab (*Al-Jami'a ad-Duwal al-Arabiyah*). Organisasi ini dibentuk berdasarkan persamaan budaya, bahasa yang sama, tidak seperti organisasi lain

yang biasanya terbentuk berdasarkan persamaan letak geografis. Liga Arab sendiri dibentuk untuk membantu negara-negara Arab agar dapat saling berkoordinasi terkait kebijakan antar negara mereka, supaya nantinya dapat menyuarakan kepentingan politik mereka di dunia internasional. Selain itu dengan didirikannya organisasi ini juga dengan harapan adanya masa depan yang terus berkembang menjadi lebih baik secara bersama-sama. Terdapat banyak sarana yang disediakan oleh piagam Liga Arab seperti sarana untuk berkoordinasi politik, hukum, budaya, pendidikan, sosial hingga komunikasi (Toffolo, *The Arab League*, 2008, p. 7).

Liga Arab memberikan wadah bagi para negara anggotanya yaitu keputusan dapat dilakukan pada tingkat masing-masing negara anggota. Diberlakukannya hal ini sebagai pencegahan dari dominasi negara-

negara Arab dari luar, selain itu, hal ini juga dilakukan agar persaingan yang ada diantara para negara anggota dapat berganti menjadi sebuah hubungan kerjasama. Negara-negara anggota diharapkan mampu membantu negara anggota lainnya sehingga seluruh negara anggota dapat berkembang dengan lebih cepat. Organisasi Liga Arab merupakan salah satu organisasi regional pertama, didirikan pada tanggal 22 Maret 1945 sebelum berakhirnya Perang Dunia II. Lahirnya organisasi ini didasarkan pada Pan-Arabisme atau gagasan nasionalisme Arab, yang menyatakan bahwa orang Arab harus saling berdiri bersama untuk menghentikan dominasi dari negara-negara Eropa. Perspektif inilah yang kemudian dianggap sebagai awal Liga Arab memprakarsai sebuah perjanjian Pertahanan dan Kerjasama Ekonomi (JDEC) pada lima tahun pembentukannya.

Perjanjian ini meminta komitmen dari negara-negara anggota Liga Arab agar dapat saling membantu satu dengan yang lainnya jika ada negara anggota yang diserang. Hal ini dikarenakan perspektif nasionalisme Arab tadi berarti suatu serangan yang ditujukan kepada salah satu negara anggota merupakan serangan terhadap seluruh negara anggota. Para negara anggota juga dilarang menggunakan kekerasan terhadap negara anggota lainnya (Toffolo, *The Arab League*, 2008, p. 18)

Organisasi Liga Arab memiliki Dewan Liga Arab sebagai otoritas tertingginya. Dewan inilah yang mendapat tugas paling besar di dalam pembuatan sebuah keputusan. Dalam Dewan Liga ini terdiri dari perwakilan tiap negara anggota, yang mana biasanya setiap perwakilan merupakan yang memiliki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri di negaranya.

Dewan Liga memiliki jadwal pertemuan rutin 2 kali tiap tahunnya yaitu pada bulan Maret dan September yang diadakan di Markas Besar Liga Arab yang berlokasi di Kairo, Mesir. Pertemuan ini akan bergantung kepada situasi kondisi saat diadakannya pertemuan. Apabila negara anggota sedang dalam keadaan terancam atau diserang, maka Liga Arab akan memanggil para Dewan untuk kemudian melakukan pertemuan berdasarkan kepada persetujuan yang diberikan oleh sepertiga jumlah anggota Liga Arab.

Dewan Liga Arab juga memiliki tugas untuk menyiapkan laporan serta pembuatan peraturan untuk pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi yang akan diadakan. Setelah itu, Dewan Liga Arab akan menindaklanjuti dan memastikan bahwa keputusan yang telah dibuat pada Konferensi Tingkat Tinggi telah dilaksanakan atau diberlakukan. Selain itu

tugas lainnya ialah membuat kebijakan maupun peraturan untuk pengoperasian Liga Arab sendiri. Dewan ini memiliki *power* (kekuatan) untuk mengubah isi dari piagam Liga Arab, memberi keputusan untuk mengakui negara anggota baru dan menerima perekrutan negara anggota baru seperti yang terjadi dengan Libya, dan mengeluarkan negara anggota seperti yang terjadi pada Mesir. Tugas penting lainnya yang dimiliki oleh Dewan Liga Arab ialah untuk menunjuk Sekretaris Jenderal dan menyetujui anggaran Liga Arab tiap tahunnya. Salah satu tanggung jawab besar yang dimiliki oleh Dewan Liga Arab ini adalah untuk mengakhiri sengketa antara negara anggota Liga Arab secara damai, memberikan pembelaan terhadap setiap negara anggota yang menjadi korban agresi, serta mengkoordinasi pengoperasian Liga Arab dengan organisasi internasional lainnya

(Toffolo, The Arab League, 2008, pp. 47-48).

Dewan Liga diberikan saran masukan atau arahan dari **Komite Permanen Khusus**. Masing-masing Komite ini terdiri dari sejumlah kecil Menteri-Menteri dari setiap negara anggota, ditambah dengan beberapa staf teknis. Komite inilah yang membantu dewan untuk mengimplementasikan atau melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil pada saat Konferensi Tingkat Tinggi. Komite ini juga memberikan saran kepada Dewan Liga dan badan-badan lainnya (Toffolo, The Arab League, 2008, p. 48).

Dewan Menteri Khusus ini terdiri dari Menteri-Menteri Pemerintahan yang relevan dari setiap negara anggota. Tugas mereka ialah merumuskan kebijakan-kebijakan untuk peraturan dan kemajuan kerjasama dalam bidang khusus sesuai dengan yang mereka

tangani. Isu-isu yang mereka tangani bisa saja dari isu kesehatan, pendidikan ataupun lingkungan. Contohnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Dewan Liga Arab akan mengadakan pertemuan secara berkala untuk mempromosikan isu-isu yang penting bagi anak-anak (Toffolo, The Arab League, 2008, p. 48).

Sehari-harinya, Liga Arab dijalankan atau dioperasikan oleh Jabatan **Sekretaris Jenderal** yang mana terdiri dari beberapa departemen yang berbeda. Masing-masing dikepalai oleh seorang Asisten Sekretaris Jenderal. Meskipun Sekretaris Jenderal dan kebanyakan staf bertugas di markas besar Liga Arab, namun terdapat staf yang ditugaskan di seluruh dunia.

Bagian besar dari tugas Sekretaris Jenderal adalah untuk mengawasi departemen yang berada dibawah posisi ini. Masing-masing juga turut diawasi oleh seorang

Asisten Sekretaris Jenderal. Setiap departemen harus menulis laporan, dan mengembangkan serta menjalankan proyek yang sejalan dengan arah tujuan kebijakan yang telah dibuat oleh Dewan Liga. Departemen membahas isu-isu yang dianggap paling penting bagi Liga Arab (seperti halnya dengan Departemen Ekonomi, Militer, dan Departemen khusus Palestina). Ada juga departemen-departemen yang dikhususkan untuk operasi internasional seperti Departemen Administrasi dan Keuangan (Toffolo, *The Arab League*, 2008, p. 51).

Parlemen Arab merupakan struktur terbaru dari Liga Arab yang mana dibentuk pada tahun 2005. Para anggota dari Parlemen Arab sendiri diambil dari setiap parlemen negara-negara anggotanya. Akan ada empat perwakilan yang diambil dari setiap negara anggota sehingga Parlemen

Arab memiliki jumlah total 88 kursi. Parlemen ini memiliki dua kali pertemuan dalam setahun. Ranah aktivitas yang ditangani oleh Parlemen Arab hanya mencakup isu-isu sosial, ekonomi, dan budaya saja.

Peran Liga Arab Dalam Konflik Palestina dan Israel

Liga Arab dalam pembentukannya telah memiliki tujuan yang terbilang sangat protektif terhadap negara anggotanya. Terlebih lagi setelah Liga Arab menyepakati perjanjian militer pada tahun 1950, yang mana dengan jelas mengatakan bahwa agresi bagi salah satu negara anggotanya berarti agresi terhadap seluruh negara anggota Liga Arab. Hal ini tentu saja berlaku bagi seluruh negara anggotanya tanpa terkecuali. Pendirian Liga Arab juga dengan tujuan untuk melindungi kedaulatan para negara anggotanya yang mana

berarti termasuk juga di dalamnya melindungi hak-hak para warga negara anggotanya. Dengan didirikannya Liga Arab ini, maka menurut Toffolo dalam bukunya yang berjudul “*Introduction to the League of Arab States*”, organisasi ini memiliki visi untuk membantu para negara anggotanya agar dapat memiliki posisi di kancah internasional (Toffolo, *The Arab League*, 2008, p. 19).

Fungsi Artikulasi

Liga Arab dalam fungsi artikulasi disini dapat diartikan dengan bagaimana organisasi ini berupaya untuk membangun komunikasi atau mengadakan perundingan guna menjembatani Palestina dengan Israel agar isu narapidana Palestina dapat diatasi. Selain dengan Israel langsung, Liga Arab juga berupaya menjembatani Palestina dengan organisasi non-pemerintah lainnya atau bahkan lembaga-lembaga yang relevan dengan isu

hak narapidana Palestina ini untuk membantu agar dapat segera diatasi (Bennet, 1979). Liga Arab sendiri dalam praktiknya menyerukan organisasi atau lembaga yang memang bergerak di bidang hak asasi manusia untuk ikut turun tangan terkait isu ini. Organisasi serta lembaga yang bergerak dalam bidang pembela hak asasi manusia dianggap sangat pantas untuk turut andil berupaya mengatasi masalah ini mengingat banyaknya laporan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel terhadap narapidana atau tahanan Palestina (Koirudin, 2004).

Dalam praktiknya seperti Liga Arab terus melakukan upaya untuk membantu para narapidana Palestina di penjara Israel agar dapat segera memperoleh haknya. Pada tanggal 31 Maret 2014, Liga Arab menegaskan bahwa mereka menuntut pembebasan seluruh tahanan wanita dan anak-anak Palestina. Salah

satu hal yang menjadi perhatian dalam konflik berkepanjangan ini ialah bagaimana Israel juga turut menahan pihak-pihak yang seharusnya dilindungi hukum internasional ketika perang. Liga Arab menuntut agar Israel segera membebaskan kelompok tahanan terakhir yang sebetulnya memang telah disepakati Israel sejak sebelum perjanjian Oslo pada tahun 1993.

Tahun 2017 menjadi salah satu periode dimana Israel menahan setidaknya 6.500 warga Palestina dengan alasan berbagai kejahatan maupun teror. Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 500 tahanan yang ditahan tanpa adanya pengadilan ataupun dakwaan. Prosedur ini disebut oleh Israel sebagai penahanan secara administratif, namun hal tersebut melanggar peraturan yang tertulis dalam Konvensi Jenewa ke-4. Liga Arab melalui Sekretaris Jendralnya, Ahmad Abul Gheit mengeluarkan pernyataan

bahwa Israel telah menyiksa narapidana Palestina. Pada bulan April tahun 2017 ini, Abul Gheit mendesak Komite Internasional Palang Merah (ICRC) untuk segera melakukan intervensi guna menghentikan penyalahgunaan kekuasaan otoritas Israel terhadap para narapidana Palestina yang ditahan di sana. Ia mengirimkan surat kepada Presiden ICRC yaitu Peter Maurer (Secretary General News, 2017). Tindakan Liga Arab ini sebagai respon dari aksi mogok makan yang kerap kali dilakukan oleh para narapidana Palestina di penjara Israel, yang bertujuan untuk menuntut otoritas Israel segera memberikan mereka perawatan medis yang lebih baik serta diberikan akses ke panggilan telepon. Abul Gheit memberikan pernyataan bahwa surat yang ia tujukan kepada ICRC tersebut merupakan upaya untuk menghubungi para aktor internasional agar dapat membantu

menghentikan pelanggaran terhadap narapidana Palestina.

Liga Arab melalui Abul Gheit menyerukan ICRC untuk segera menuntut Israel agar memperlakukan tahanan Palestina di penjara Israel sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh standar hukum humaniter internasional. Tindakan Liga Arab yang meminta bantuan ICRC untuk segera ikut campur ini merupakan respon dari bagaimana otoritas Israel bertindak sewenang-wenang terhadap para narapidana Palestina. Terlebih lagi dengan berbagai tindakan pelanggaran hukum internasional seperti Konvensi Jenewa (El-Shahed, 2017).

Pada bulan Mei 2017, Liga Arab mengadakan pertemuan untuk memperingati Nakba Palestina atau yang juga dikenal dengan eksodus rakyat Palestina yang terjadi pada tahun 1948 di markas Liga Arab di

Madrid. Peringatan ke-69 Nakba Palestina ini diadakan dengan meminum air asin yang mana menjadi pengingat bahwa ada 1.600 tahanan politik Palestina di dalam penjara Israel yang melakukan mogok makan dan hanya mengonsumsi air dan garam saja sebagai bentuk tuntutan terhadap otoritas Israel supaya segera menerapkan hukum internasional terkait narapidana. Acara peringatan ini dihadiri oleh seluruh Duta Besar dan Konsul Jenderal negara-negara Arab. Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Palestina, Musa Amer Odeh, memberikan informasi bahwa terdapat lebih dari 60 tahanan sedang menghadapi kondisi kritis, namun mereka tetap bersikukuh untuk mempertahankan aksi mogok makannya hingga Israel mau memenuhi tuntutan mereka (Arab ambassadors to Spain support Palestinian prisoners on a hunger strike, 2017).

Sebagai bentuk respon dari seruan atau undangan yang disampaikan oleh Liga Arab terhadap ICRC, terdapat beberapa pernyataan yang diberikan oleh ICRC sendiri. ICRC menyatakan bahwa mereka merupakan organisasi kemanusiaan yang netral sehingga tidak akan mendukung salah satu pihak. Aksi mogok makan yang dilakukan oleh para narapidana Palestina ini memang bukan bentuk protes baru, terhitung sejak tahun 2012, para narapidana terlihat lebih memilih untuk menggunakan aksi mogok makan sebagai bentuk protes atas tindakan-tindakan otoritas Israel di penjara. Peran serta prinsip kerja ICRC sendiri akan berfokus kepada kondisi kesehatan dan kesejahteraan para pelaku aksi mogok makan. ICRC akan selalu berupaya untuk memastikan bahwa hak-hak para tahanan yang melakukan mogok makan, martabat serta integritas mereka sebagai pasien

harus tetap dihormati. Selain itu juga memastikan bahwa perawatan yang mereka terima serta kondisi penahanan mereka haruslah sesuai dengan standar internasional dan juga manusiawi. ICRC juga yang nantinya akan menjembatani komunikasi antara para tahanan dan anggota keluarga selama mereka masih melakukan mogok makan. Sebagai organisasi netral, ICRC tidak dapat melakukan advokasi guna mengakhiri mogok makan atau membuat otoritas Israel menyetujui tuntutan para narapidana. Peran ICRC lebih kepada mendorong para pelaku aksi mogok makan, perwakilan narapidana serta otoritas terkait untuk berkomunikasi dengan baik agar dapat menemukan solusi sehingga dapat mencegah hilangnya nyawa narapidana yang melakukan aksi mogok makan.

Ketika ICRC mengunjungi penjara

dimana para narapidana melakukan mogok makan, anggota mereka akan menilai situasi dengan sangat hati-hati agar dapat memahami masalah yang sedang dihadapi. Cara yang diterapkan oleh ICRC untuk mendapatkan penilaian ialah dengan mengadakan pertemuan pribadi bersama para tahanan, berdiskusi dengan manajer penjara, staf perwalian dan staf kesehatan yang bertanggung jawab atas para narapidana. ICRC tidak mendukung aksi mogok makan sebagai bentuk protes para narapiana. Namun ICRC juga tidak akan ikut di dalam negosiasi antara pihak berwenang dan tahanan terkait aksi mogok makan ini. Langkah yang diambil oleh ICRC justru merupakan mendesak pihak-pihak yang terlibat di dalam aksi mogok makan ini. Mereka akan mendesak otoritas penahanan dan juga tahanan untuk segera melakukan negosiasi hingga ditemukan solusi.

Sembari mendesak pihak yang terlibat, mereka juga akan terus berusaha untuk memastikan bahwa hak, integritas fisik serta psikologis para tahanan yang melakukan mogok makan akan tetap dihormati. ICRC akan terus mengunjungi para tahanan yang melakukan mogok makan secara berkala untuk melakukan penilaian lanjutan. ICRC juga memiliki hak untuk membantu para tahanan agar bisa berkomunikasi dengan anggota keluarganya guna menyampaikan salam verbal dan terus melaporkan kondisi terkini dari para tahanan atas seizin tahanan itu sendiri (Hunger strikes in prisons in Israel and the occupied territories, 2016).

Tindakan yang dapat diambil oleh ICRC inilah yang mendasari Liga Arab meminta ICRC agar dapat segera turun tangan atas aksi mogok makan narapidana Palestina di penjara Israel. ICRC menjadi salah satu

organisasi yang dapat langsung berinteraksi dengan para narapidana di dalam penjara Israel. Di dalam tuntutanannya, salah satu hak yang dituntut oleh para narapidana Palestina yang mogok makan ialah hak untuk dapat tetap berkomunikasi dengan anggota keluarganya. Tindakan Liga Arab yang menyerukan organisasi-organisasi internasional dan juga lembaga-lembaga internasional yang relevan ini dianggap menjadi keputusan yang baik. Hal tersebut dikarenakan di bawah desakan ICRC, otoritas Israel akan melakukan diskusi untuk bernegosiasi terkait tuntutan narapidana. Selain itu juga atas bantuan ICRC, para narapidana dapat berkomunikasi kembali bersama anggota keluarganya yang mana hal ini juga menjadi perhatian khusus karena para narapidana dibatasi untuk berkomunikasi dengan anggota keluarga mereka. Tetap menjalin komunikasi dengan anggota keluarga merupakan salah satu hak

narapidana yang diatur dalam Konvensi Jenewa keempat. Hak untuk tetap berkomunikasi dengan anggota keluarga ini juga merupakan salah satu hak yang tidak diberikan kepada para narapidana Palestina oleh Israel. Israel dan Palestina sama-sama meratifikasi Konvensi Jenewa sehingga keduanya sama-sama terikat oleh hukum yang telah diatur di dalam konvensi tersebut dan harus tunduk dalam menjalankan praktik terkait isu narapidana (The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols, 2014).

Atas tindakan yang telah diambil oleh Liga Arab untuk meminta seluruh organisasi-organisasi dan juga lembaga-lembaga relevan untuk campur tangan, yang mana pada akhirnya ICRC dan Amnesty Internasional ikut memberikan perhatian terhadap isu ini. Terutama ICRC yang memiliki akses lebih luas terhadap para narapidana Palestina, yang terus mendesak pihak-

pihak yang terlibat untuk segera melakukan komunikasi, akhirnya pada tanggal 27 Mei 2017, Israel menawarkan kesepakatan kompromi untuk memenuhi beberapa tuntutan para narapidana yang melakukan aksi mogok makan. Kesepakatan ini menjadi bukti atas keberhasilan ICRC yang dijembatani oleh Liga Arab untuk mendesak pihak yang terlibat agar segera mengadakan komunikasi. Seorang juru bicara layanan penjara Israel, Nicole Englander, mengatakan bahwa mogok makan ini telah berakhir setelah terdapat kesepakatan dengan otoritas Palestina. Dalam kesepakatan disebutkan bahwa tahanan dapat menerima kunjungan keluarga dua kali dalam satu bulan dan agar tahanan diizinkan berbicara dengan keluarga mereka melalui telepon umum di bawah pengawasan otoritas penjara (Beaumont, 2017).

Fungsi Agregasi

fungsi agregasi yang dimiliki oleh Liga Arab terlihat dalam praktiknya yang mengagagas *Arab Peace Initiative* (API). API awalnya diperkenalkan oleh Pangeran Abdullah bin Abdul Aziz, yang merupakan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi. Usulannya ini disetujui oleh Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab pada tahun 2002 yang berlokasi di Beirut. Kepentingan utama API ialah bahwa ini merupakan inisiatif yang mewakili konsensus dari 22 negara Arab (serta selanjutnya 57 negara islam), menjadikan API sebuah rencana dari seluruh negara Arab, bukan hanya rencana beberapa negara atau satu negara Arab. Maka daripada itu, penerimaan Israel atas API akan mengarah kepada perdamaian komprehensif dengan seluruh negara Arab dan negara Islam, terlepas dari adanya

perbedaan ideologis mereka.

Setelah itu, API juga membawa kepentingan internasional karena telah dikonfirmasi oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1850 dan 1860 pada tahun 2008 dan tahun 2009. Hal ini disebutkan di dalam Roadmap Berbasis Kinerja milik Kuartet di tahun 2003. Kuartet sendiri merupakan lembaga yang mensponsori perdamaian negara Palestina dan Israel yang tidak kunjung usai ini. Pihak-pihak yang berada dibalik lembaga ini adalah Rusia, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa. Sehingga dengan demikian, API dapat dikatakan menjadi rencana internasional, negara Arab dan negara Islam yang disampaikan kepada Israel. Maka dari itu, komunitas internasional juga bertanggung jawab untuk mempromosikan dan mengimplementasikan API. Selain itu, kepentingan dari API ialah, Liga Arab telah

menciptakan sebuah mekanisme untuk promosi serta implementasi guna memfasilitasi kerja sama dengan komunitas internasional dalam API. Mekanisme tersebut ialah yang pertama, Yordania dan juga Mesir didelegasikan oleh Liga Arab untuk mewakili API dengan Israel; dan kedua, Komite tindak lanjut dibentuk dan diberi tugas untuk mewakili API dengan komunitas internasional. Komite ini diketuai oleh negara yang menduduki jabatan Presiden Liga Arab. Kemudian pada KTT bulan Maret yang berlokasi di Sharm A-Sheikh, Mesir selaku ketua komite pada tahun tersebut menambahkan mekanisme yang ketiga. Dalam mekanisme terbaru tersebut dibentuk sebuah komite yang terdiri dari Mesir (pemegang kepresidenan Liga Arab saat itu), Yordania (perwakilan Arab di DK PBB), Maroko (pemegang kepresidenan Liga Arab 2016), Nabil Al Arabi

selaku Sekretaris Jenderal dan Palestina. Tugas dari komite ini ialah untuk mengangkat status Palestina di PBB. Komite ini mengadakan pertemuan pada tanggal 6 April di Kairo dan memutuskan untuk pergi ke DK PBB dengan rancangan resolusi Arab di bawah payung API yang menyerukan Israel agar mengakhiri pendudukannya atas *Occupation Palestine Territory* (OPT) dalam jangka waktu yang terbatas.

Upaya-upaya yang awalnya didasarkan kepada usaha Liga Arab untuk mencari solusi bagi negara anggotanya ini berhasil menginisiasi Liga Arab untuk meloloskan API dan membawanya ke skala internasional melalui PBB. Meskipun tidak dibahas secara spesifik di dalamnya, namun nasib narapidana Palestina yang berada di penjara Israel tetap menjadi prioritas dari Liga Arab. Melihat bagaimana Liga Arab mengatur kerjasama

dengan sedemikian rupa bersama Kuartet memperlihatkan keinginan Liga Arab dapat terlibat lebih dalam lagi dalam proses perdamaian keduanya. Bagaimanapun juga, tujuan utama dari API ialah normalisasi keadaan di Palestina dan juga Israel. Ketika tujuan tersebut telah terpenuhi dan tercapai damai antara negara Palestina dan juga Israel, maka itu berarti para narapidana Palestina juga akan mendapatkan efek dari perdamaian yang bisa dipastikan akan dibebaskan atau paling tidak mereka tidak akan ada lagi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel terhadap para narapidana (Sen, 2016).

Fungsi Informasi

Menurut Bennet, fungsi ke-delapan dari organisasi internasional ialah informasi. Organisasi internasional memiliki peranan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah serta menyebarkan informasi. Begitu juga

dengan Liga Arab yang juga memiliki fungsi informasi dalam pengoperasiannya. Organisasi internasional akan mencari informasi yang berkaitan dengan isu tertentu yang berkaitan dengan jalannya integritas organisasi tersebut. Informasi atau data yang didapatkan bisa saja berasal dari lembaga di bawah naungan organisasi internasional itu sendiri, dari organisasi internasional lainnya yang relevan dengan isu, ataupun lembaga lainnya yang relevan dengan isu. Setelah informasi dan data telah diolah maka informasi valid mengenai isu tersebut akan disebarkan kepada para negara anggota dan juga negara bukan anggota (umum) (Bennet, 1979).

Dalam praktiknya, Liga Arab juga melakukan hal serupa dengan fungsi informasi yang dikemukakan oleh Bennet. Dapat dilihat langsung pada situs web resminya, dalam setiap rilis yang

dipublikasikan, Liga Arab akan mencantumkan sumber dari data yang diperoleh. Tentunya sumber-sumber informasi yang diperoleh oleh Liga Arab adalah sumber yang valid karena berasal dari pengamatan, penelitian ataupun penerjunan langsung ke lapangan oleh lembaga-lembaga, komunitas-komunitas dan organisasi-organisasi yang kredibel.

Penyebaran atau penyampaian informasi ini sangat penting dalam proses pencapaian kepentingan bagi negara anggota sebuah organisasi internasional. Dalam kasus pelanggaran hak-hak narapidana yang dialami oleh narapidana Palestina di penjara Israel ini, Liga Arab dengan konsisten menyatakan bahwa mereka akan terus mengangkat kasus ini ke forum atau diskusi internasional. Hal itu akan menjadi pengingat bahwa para rakyat Palestina khususnya para Narapidana belum menerima hak-hak mereka.

Para masyarakat Palestina masih belum bisa menentukan nasibnya sendiri tanpa adanya intervensi internasional serta hak untuk kemerdekaan dan kedaulatan, hak untuk memiliki rumah dan harta benda mereka seperti apa yang telah diatur oleh Resolusi PBB nomor 194 (Wardah, 2018).

Kesimpulan

Dibentuknya sebuah organisasi internasional pertama di dunia pada bulan Maret 1945 bernama Liga Arab yang bertujuan untuk memudahkan koordinasi antar ke-22 negara anggotanya. Suriah, Mesir, Lebanon, Irak, Yordania, Yamas serta Arab Saudi sebagai negara yang menginisiasi dibentuknya organisasi ini memiliki kesepakatan untuk dapat melakukan kerjasama dan saling mendukung dalam bidang ekonomi, budaya, komunikasi, kesehatan dan lain-lain. Organisasi ini memiliki struktur organisasi yang terbilang

lengkap dengan tiga badan utama struktur institusional (Dewan, Sekretariat Permanen dan sejumlah Komite Permanen). Dalam menaungi para negara anggotanya, memiliki sebuah komitmen untuk mengintervensi konflik yang nantinya memicu perang antar negara anggota. Komitmen ini diperkuat dengan sebuah kesepakatan perjanjian militer pada tahun 1950, agresi terhadap satu negara Arab akan dianggap sebagai agresi bagi seluruh negara anggota, maka seluruh negara anggota akan menyelesaikan secara bersama.

Dalam pembentukannya, terdapat satu poin ambisius yang dicanangkan Liga Arab dalam visinya yaitu untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Dengan visi ini, mengartikan bahwa seluruh negara anggota bersedia membantu untuk Palestina mendapatkan kemerdekaannya kembali. Selain itu hak bagi para warga negara Palestina

tentu saja juga menjadi perhatian. Liga Arab dengan visi tersebut berarti juga memiliki tanggung jawab atas kelangsungan hidup para narapidana Palestina yang berada di Penjara Israel. Panjangnya konflik yang dialami oleh Palestina dan Israel dikarenakan diplomasi Israel yang semakin baik.

Liga Arab dengan visi awalnya tentu saja memiliki tanggung jawab atas kasus ini. Liga Arab dalam fungsi artikulasinya, menjadi jembatan antara ICRC dan juga Israel agar dapat membantu para narapidana. Liga Arab seringkali menyerukan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga relevan untuk segera campur tangan menangani isu tersebut. ICRC menjadi salah satu organisasi yang menangani kasus aksi mogok makan para narapidana Palestina. ICRC dapat langsung berinteraksi dengan para narapidana berbeda dengan Liga Arab. Sebagai organisasi netral, ICRC

menekankan bahwa mereka tidak membenarkan aksi mogok makan para narapidana, namun tetap menghargai pilihan mereka untuk bergabung dalam aksi mogok makan. Selain itu, ICRC juga terus menekan para pihak yang terlibat untuk segera mengadakan diskusi untuk menemukan solusi atas isu ini. Atas desakan ICRC serta kecaman beberapa organisasi atau lembaga pejuang kemanusiaan lainnya yang telah diserukan oleh Liga Arab, akhirnya Israel bersedia untuk melakukan negosiasi dan mendapatkan sebuah kesepakatan. Mogok makan akhirnya dapat diakhiri dengan kesepakatan diizinkan para narapidana menerima kunjungan keluarga sebanyak dua kali dalam sebulan dan diberikannya izin bagi narapidana untuk berkomunikasi dengan anggota keluarganya melalui telepon umum dengan pengawasan otoritas penjara.

Dijalankannya fungsi agregasi yang dimiliki Liga Arab ditandai dengan dicanangkannya *Arab Peace Initiative* (API). Tujuan dari Liga Arab menyetujui rancangan API pada KTT Beirut ini tidak lain karena visi memerdekakan Palestina. Agar dapat membantu Palestina, dengan diwujudkan implementasi Resolusi DK PBB yang berbasis API akan memberikan harapan yang lebih baik bagi Palestina di kancah internasional. API memiliki peran agar Palestina dapat mensejajarkan posisinya dengan Israel. Alat diplomatik yang digunakan oleh Liga Arab disini ialah keanggotaan PBB, Resolusi DK PBB serta mekanisme internasional lainnya. API juga digunakan untuk membangun fakta-fakta di lapangan yang berusaha dihilangkan Israel. Dalam salah satu kepentingannya, narapidana Liga Arab lagi-lagi disebutkan. Hal ini menjadi bukti bagaimana

Liga Arab terus mencari cara agar dapat membebaskan para narapidana dengan berbagai cara.

Terakhir ialah fungsi informasi yang menjadi hal lazim bagi organisasi internasional. Organisasi akan terus membagikan informasi atau rilis kepada para negara anggotanya serta umum. Hal itu dilakukan agar mereka terbantu untuk mendapat dukungan mencapai kepentingannya. Hal sama juga dilakukan oleh Liga Arab melalui situs resminya yang secara rutin akan mengunggah dokumen atau rilis terkini mengenai kegiatannya dan keadaan para negara anggotanya. Kita dapat menerima informasi terkait upaya-upaya yang diberikan liga Arab untuk membantu memperbaiki nasib para narapidana Palestina di penjara Israel. Selain itu, Liga Arab dengan fungsi informasinya juga berkomitmen untuk terus mengangkat kasus

Palestina dan narapidana di berbagai kesempatan seperti forum atau konferensi. Upaya tersebut merupakan perjuangan Liga Arab agar dunia tidak

melupakan bahwa Palestina masih memperjuangkan nasibnya dalam konflik tidak berkesudahan ini.

Daftar Pustaka

Almas, P. (2019, mei 20). *Perlakuan tidak Manusiawi di Penjara Israel*. Retrieved from [republika.co.id: https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/19/05/20/prsgpj366-perlakuan-tidak-manusiawi-di-penjara-israel](https://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/19/05/20/prsgpj366-perlakuan-tidak-manusiawi-di-penjara-israel)

Arab ambassadors to Spain support Palestinian prisoners on a hunger strike. (2017, Mei 2019). Retrieved from

thediplomatinspain.com:

<https://thediplomatinspain.com/en/2017/05/arab-ambassadors-to-spain-support-palestinian-prisoners-on-a-hunger-strike/>

Beaumont, P. (2017, Mei 27). *Mass Palestinian hunger strike in Israeli jails ends after visitation deal*. Retrieved from theguardian.com:
<https://www.theguardian.com/world/2017/may/27/mass-palestinian-hunger-strike-israel-ends>

Bennet, A. L. (1979). *International Organization*. New Jersey: Prentice Hall Inc.

El-Shahed, M. (2017, Maret 26). *Arab League urges ICRC to intervene on Palestinian prisoners*. Retrieved from benonicitytimes.co.za:
<https://benonicitytimes.co.za/afp/266046/arab-league-urges-icrc-to-intervene-on-palestinian-prisoners>

Firman, T. (2019, Maret 22). *Sejarah Liga Arab: Tak Banyak Berkutik saat Anggotanya Bertikai*. Retrieved from tirtoid: <https://tirtoid/sejarah-liga-arab-tak-banyak-berkutik-saat-anggotanya-bertikai-djuQ>

Hunger strikes in prisons in Israel and the occupied territories. (2016, Januari). Retrieved from blogs.icrc.org: <https://blogs.icrc.org/ilot/hunger-strikes-in-prisons-in-israel-and-the-occupied-territories/>

Jatmika, S. (2016). *Hubungan Internasional di Kawasan Timur Tengah*. Yogyakarta: Samudra Biru.

Koirudin. (2004). *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

League, A. (n.d.). *League of Arab States*. Retrieved from Arab League: <https://arab.org/directory/league-of-arab-states/>

Rudy, T. M. (2009). *Administrasi dan Organisasi Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Secretary General News. (2017, April 26). Retrieved from League of Arab States: <http://www.leagueofarabstates.net/ar/news/Pages/GSNews.aspx>

Sen, A. K. (2016, Mei 12). *Give Arab Peace Initiative a Chance*. Retrieved from atlanticcouncil.org: <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/give-arab-peace-initiative-a-chance/>

The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols. (2014, Januari 1). Retrieved from INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS: <https://www.icrc.org/en/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols>

Toffolo, C. E. (2008). *The Arab League*. New York: Chelsea House Publishers.

Toffolo, C. E. (2008). *The Arab League (Global Organization)*. New York: Infobase Publishing.

Wardah, F. (2018, November 29). *Dubes Palestina: Dunia Harus Ingat Palestina Belum Merdeka*. Retrieved from voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/dubes-palestina-dunia-harus-ingat-palestina-belum-merdeka/4679790.html>